

Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara

Dessy Lora Dearn Damanik¹, Iskandar Muda², Azizul Kholis³.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: Dessy24damanik@gmail.com (Corresponding Author)

^{2,3} Dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Laporan keuangan yang berkualitas merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Rekonsiliasi Data, Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Penerapan Standar Akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif, dimana instrumennya menggunakan kuesioner. Sampel pada penelitian adalah 188 responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling total terhadap PPSPM, PPK Bendahara, Penata Keuangan Pengelola Barang Milik Negara, dan analisis Barang dan Jasa yang tersebar di 59 Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Data diolah dengan menggunakan Smart-PLS. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Rekonsiliasi Data, Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Penerapan Standar Akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya variabilitas yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 86 %, sedangkan sisanya sebesar 14 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Katakunci: Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Rekonsiliasi Data, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi pemerintah.

Sitasi: Damanik, D. L. D., Muda, I., & Kholis, A. (2022). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.48>

1. Pendahuluan

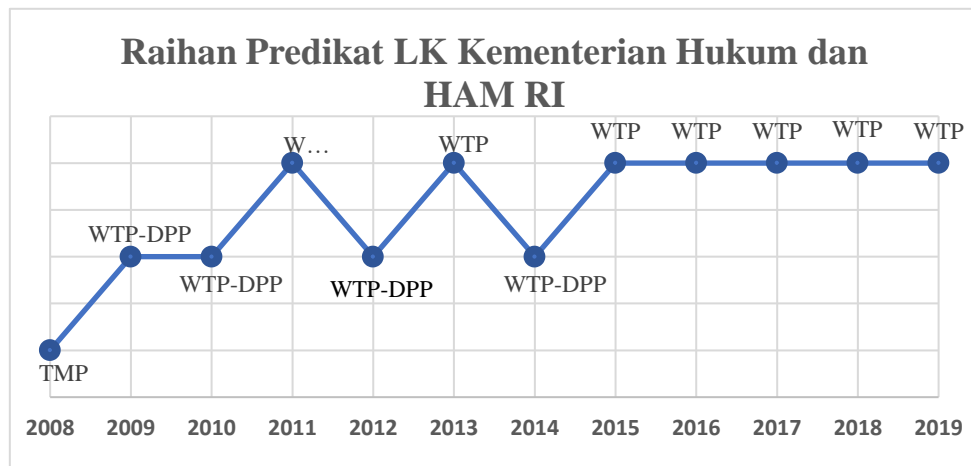
Dewasa ini perkembangan sektor publik di Indonesia ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2021). Akuntabilitas melingkupi beberapa dimensi yaitu dimensi akuntabilitas dalam hukum, dimensi akuntabilitas dalam manajerial, dimensi akuntabilitas dalam program, dimensi akuntabilitas dalam kebijakan, dan dimensi akuntabilitas dalam keuangan (Rasul, 2003).

Telah diketahui bahwa terdapat banyak pihak yang akan menggunakan dan mengandalkan data dan informasi dalam laporan keuangan yang dibagikan dan dipublikasikan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan urgensi pelaporan keuangan yang berkualitas. Apabila informasi keuangan yang disajikan mudah dipahami, mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan pengambilan keputusan, terbebas dari pemahaman yang menyesatkan dan terdapatnya kesalahan yang bersifat materil, serta dapat diandalkan sehingga dapat dijadikan pembanding dengan laporan keuangan periode sebelumnya, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat dikatakan berkualitas.

Komitmen terkait reformasi keuangan juga ditunjukkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana capaian kinerja keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 1. Perkembangan Opini laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2008 – 2019.



Namun pencapaian berturut-turut ini menjadi tantangan tersendiri untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (RI). Pertanyaan mampukah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (RI) menjaga dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi pertanyaan yang harus mampu dijawab oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (RI) pada umumnya dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sumatera Utara, khususnya yang notabene merupakan salah satu unit penyumbang keberhasilan atau keterpurukan pengelolaan dan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (RI).

Secara kelembagaan di tingkat kementerian, penilaian terhadap penggunaan, penyelenggaraan serta pelaporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tergolong baik. Namun, hal ini dirasa masih belum sejalan dengan pencapaian Kantor Wilayah. Secara Kantor Wilayah, masih banyak permasalahan-permasalahan yang layak mendapat perhatian. Lembaran temuan hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2019 untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dan Surat Inspektorat Jenderal No: ITJ.PW.03.01.V-02 hal petunjuk penanganan dan penertiban atas audit pengadaan barang/jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 menunjukkan masih banyak ditemukan kelemahan dari segala aspek dan diperlukan perbaikan dari segala sisi. Adapun ringkasan temuan permasalahan tersebut meliputi proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat; tidak memadainya sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan; keterlambatan dalam menyampaikan laporan dan Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Demikian pula permasalahan lain ditemukan pada kelemahan struktur pengendalian intern dimana SOP belum disusun atau tidak lengkap; SOP belum berjalan optimal dan Satuan pengawan intern tidak optimal.

Pengelolaan keuangan di 59 (lima puluh sembilan) satuan kerja di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pun tidak jauh berbeda dan menunjukkan indikasi yang serupa. Hal ini dapat dilihat salah satunya dengan raihan IKPA (Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran) 2020 yang masih perlu diperbaiki. Minimnya dan bahkan nyaris tidak adanya kajian terkait hal ini juga menjadi kelemahan besar di tubuh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara secara keseluruhan.

Kualitas laporan keuangan dideterminasi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal ((Hutagalung et al., 2018), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Rekonsiliasi Data, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Panji Papat Adhitama, dkk, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut menunjukkan bahwa faktor – faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (Zulkarnain, dkk, 2020), Sistem Pengendalian Internal (Indra Sutoyo Kurniawan, 2016), Sistem Akuntansi Keuangan (Syarifuddin Lubis., 2017), Sistem Akuntansi Pemerintah (Yulia Fitri, 2018) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Pembeda antara penelitian yang dilakukan dengan gap penelitian diatas penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel independen yang diasumsikan dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Alasan dipililinya 5 (lima) variabel tersebut adalah sebagai berikut; Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁), menunjukan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dankarakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2012).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₂), adalah suatu proses karena ternasuk didalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan (Romney dan Steibart, 2012). Sistem pengendalian internal yang baik akan dapat memprediksi terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak, kalaupun terjadi kesalahan dan penyelewengan hal ini dapat diketahui dengan cepat.

Pemanfaatan TI (X₃), menunjukkan Teknologi yaitu sistem untuk melakukansesuatu dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal (*hardware* dan *software*) seolah-olah memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia, sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian atau penataan dari sekedar kelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya (Sutabri 2014:2).

Rekonsiliasi Data (X₄), adalah salah satu kunci utama penyusunan laporan keuangan yang memiliki nilai akuntabel dikarenakan kehadirannya yang cukup penting dalam meminimalisasir adanya perbedaan pencatatan yang berdampak pada keabsahan dan ketepatan data yang disampaikan dalam laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan Pinem mengenai studi empiris pada satuan kerja mitra kerja KPPN Medan II pada tahun 2015, menunjukkan adanya pengaruh rekonsiliasi data terhadap Kualitas Laporan Keuangan baik secara parsial maupun simultan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X₅), menunjukkan nilai yang menunjkkkan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan. Indra Bastian menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (2005). Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalamupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Kusumah, 2012).

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah diatas, dapat didefinisikan bahwa, masih terdapat ketidak konsistenan penelitian sebelumnya mengenai analisis determinan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan fenomena yang diangkat masih terdapat permasalahan terkait kualitas laporan keuangan secara khusus pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) mengidentifikasikan kepatuhan seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku, begitupun dengan pemerintah yang harus dan berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Sejalan dengan ini, Berdasarkan pendekatan teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*) peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi *Agency*

Theory tidak menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan antara pihak pemerintah dengan pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan; Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan; Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (TI) terhadap kualitas laporan keuangan; Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rekonsiliasi data terhadap kualitas laporan keuangan dan Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis data *structural equation modeling-partial least squares* (SEM-PLS) dengan menggunakan *software* SmartPLS. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian, Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga merupakan penelitian penjelas (*explanatory research*) yang melihat hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada 59 (lima puluh sembilan) satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) satuan kerja yakni 9 (sembilan) DIPA Kantor Wilayah, 49 (empat puluh sembilan) Cabang Rumah Tahanan Negara, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan, 2 (dua) Balai Pemasyarakatan, 6 (enam) Kantor Imigrasi, 1 (satu) Rumah Detensi Imigrasi, 1 (satu) Balai Harta Peninggalan, serta 1 (satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dimana pegawai yang akan diberikan kuesioner adalah PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (jika ada), Bendahara Penerimaan (jika ada), Penata Keuangan yang keseluruhannya berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) Pegawai. Dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) pegawai karena menggunakan teknik pengambilan sampling sensus.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan kuesioner, dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan kuesioner. Pengukuran indikator variabel dalam penelitian ini, jawaban untuk pertanyaan positif dan negatif dibuat dalam bobot penilaian yaitu Sangat setuju (SS) diberi bobot 5; Setuju (S), diberi bobot 4; Kurang Setuju (KS), diberi bobot 3; Tidak Setuju (TS). diberi bobot 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS), diberi bobot 1. Kemudian, analisis data penelitian menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* dengan menggunakan perangkat pengolah data dalam persamaan dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square (PLS)*.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran umum responden membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengolahan data dalam upaya pengujian hipotesis, seperti hasil penyebaran kuesioner, hasil statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. Dari penyebaran kuesioner yang dilakukan sejak pertengahan Agustus sampai pertengahan Oktober 2021.

Tabel 1.
Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

Jenis	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Kuesioner yang dibagikan	188	100%
Kuesioner yang tidak diisi	-	0%
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	-	0%
Kuesioner yang dapat diolah	188	100%

Sumber : data primer, diolah.

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa. dari 188 kuesioner yang disebar pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, terdapat sebanyak 188 kuesioner yang dikebalikan, sehingga *respon rate* untuk Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 100%. Dari 188 kuesioner yang dikembalikan tidak terdapat kuesioner yang tidak layak untuk diolah karena diisi lengkap oleh responden sehingga data yang siap untuk diolah adalah 188 kuesioner.

3.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan di jajaran satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara atas beberapa variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2.
Persepsi Responden atas Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Total	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0	34	18.09	38	20.21	57	30.32	59	31.38	188	100
2	2	1.06	31	16.49	42	22.34	50	26.6	63	33.51	188	100
3	0	0	37	19.68	40	21.28	53	28.19	58	30.85	188	100
4	0	0	35	18.62	44	23.4	42	22.34	67	35.64	188	100
5	0	0	38	20.21	39	20.74	46	24.47	65	34.57	188	100

6	1	0.53	31	16.49	40	21.28	58	30.85	58	30.85	188	100
7	0	0	32	17.02	40	21.28	56	29.79	60	31.91	188	100
8	0	0	31	16.49	43	22.87	48	25.53	66	35.11	188	100
9	0	0	34	18.09	36	19.15	55	29.26	63	33.51	188	100
10	0	0	34	18.09	50	26.6	41	21.81	63	33.51	188	100
11	1	0.53	36	19.15	30	15.96	59	31.38	62	32.98	188	100
12	2	1.06	32	17.02	38	20.21	50	26.6	66	35.11	188	100
13	0	0	33	17.55	42	22.34	47	25	66	35.11	188	100
14	0	0	32	17.02	47	25	45	23.94	64	34.04	188	100
15	0	0	30	15.96	45	23.94	50	26.6	63	33.51	188	100

Hasil pengujian pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Berdasarkan persepsi responden setuju bahwa kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan jawaban responden terhadap indikator kualitas sumber daya manusia, dapat diketahui bahwa kemampuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara sangat menentukan kualitas laporan keuangan.

3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 3.
Persepsi Responden Atas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Total	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0	31	16.49	44	23.4	55	29.26	58	30.85	188	100
2	0	0	34	18.09	40	21.28	55	29.26	59	31.38	188	100
3	0	0	31	16.49	47	25	48	25.53	62	32.98	188	100
4	1	0.53	35	18.62	42	22.34	53	28.19	57	30.32	188	100
5	1	0.53	31	16.49	44	23.4	63	33.51	49	26.06	188	100
6	1	0.53	28	14.89	36	19.15	55	29.26	68	36.17	188	100
7	1	0.53	33	17.55	47	25	51	27.13	56	29.79	188	100
8	0	0	30	15.96	44	23.4	60	31.91	54	28.72	188	100

9	1	0.53	35	18.62	41	21.81	52	27.66	59	31.38	188	100
---	---	------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	-----	-----

Hasil pengujian pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa semakin besar sistem pengendalian internakan semakin besar juga kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh jawaban sebagian besar responden yang setuju terhadap indikator-indikator sistem pengendalian intern. Namun demikian beberapa responden memberikan jawaban netral dan sebagian kecil tidak setuju.

SPIP dalam penyelenggaraan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Maka setiap pimpinan berkewajiban melakukan pengendalian intern terhadap kegiatan pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang berkualitas. (Kartika, 2013)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang dilakukan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Susilawati (2014) dan Hidayat (2014) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula hasil penelitian Syamsuar (2013) menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian intern akan meningkatkan keandalan laporan keuangan yang merupakan salah satu prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Manaf (2015) yang menunjukkan bahwa penerapan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 4.
Persepsi Responden Atas Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Total	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0	41	21.81	39	20.74	50	26.6	58	30.85	188	100
2	1	0.53	35	18.62	41	21.81	58	30.85	53	28.19	188	100
3	0	0	39	20.74	39	20.74	46	24.47	64	34.04	188	100

4	2	1.06	36	19.15	34	18.09	61	32.45	55	29.26	188	100
5	0	0	37	19.68	40	21.28	54	28.72	57	30.32	188	100
6	2	1.06	37	19.68	38	20.21	52	27.66	59	31.38	188	100
7	1	0.53	36	19.15	44	23.4	52	27.66	55	29.26	188	100

Hasil pengujian statistik t menunjukkan bahwa Teknologi Informasi (TI) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan menunjukkan nilai p value lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian H_1 diterima. Teknologi informasi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Darwanis (2009) yang menyatakan semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, maka akan meningkatkan keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi human error, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian Aryani (2013) menyatakan bahwa pemanfaat teknologi informasi berpengaruh secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II. Agustina (2015) bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian Lubis (2016), menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh signifikan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum yang terdapat di Kota Medan. Sianturi (2016) hasil penelitian diketahui bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pinem (2015) Hasil dari penelitian secara simultan dan parsial menunjukkan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian Nuryanto dan Afiah (2013) juga membuktikan bahwa ada pengaruh secara simultan dan parsial pemanfaatan teknologi informasi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di unit-unit kerja pemerintah provinsi DKI Jakarta. Sari et al., (2016) bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo). Yudianta dan Erawati (2012) bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

3.4 Pengaruh Rekonsiliasi Data Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 5.
Persepsi Responden Atas Rekonsiliasi Data

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Total	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	1	0.53	33	17.55	44	23.4	56	29.79	54	28.72	188	100
2	1	0.53	31	16.49	39	20.74	48	25.53	69	36.7	188	100
3	1	0.53	33	17.55	48	25.53	43	22.87	63	33.51	188	100
4	1	0.53	31	16.49	40	21.28	52	27.66	64	34.04	188	100
5	0	0	33	17.55	46	24.47	45	23.94	64	34.04	188	100

Pengaruh variabel rekonsiliasi data secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan berdasarkan hasil uji t dengan menunjukkannilai p value lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan korelasi positif antara rekonsiliasi data terhadap kualitas laporan keuangan, yakni semakin tingginya rekonsiliasi data maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pada satker Kementerian Agama mitra kerja KPPN Tebing Tinggi. Konsekuensi logisnya dapat dinyatakan bahwa peran rekonsiliasi data sangat penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan dikarenakan tidak tepat waktu yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Agar data yang dihasilkan sistem akuntansi pemerintah pusat relevan dan dapat diandalkan maka perlu dilakukan rekonsiliasi data untuk menjamin ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/lembaga, rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Hal ini didukung oleh penelitian Pinem (2015) yang menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial rekonsiliasi data berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Medan II). Penelitian Herdianto (2015) juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satker-satker pada Kementerian Ketenagakerjaan di wilayah DKI Jakarta dan satker-satker UPTP di daerah

3.5 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 6.
Persepsi Responden atas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pertanyaan	STS		TS		N		S		SS		Total	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	2	1.06	31	16.49	42	22.34	52	27.66	61	32.45	188	100
2	1	0.53	30	15.96	36	19.15	58	30.85	63	33.51	188	100
3	1	0.53	34	18.09	38	20.21	58	30.85	57	30.32	188	100
4	0	0	31	16.49	50	26.6	49	26.06	58	30.85	188	100
5	2	1.06	34	18.09	44	23.4	52	27.66	56	29.79	188	100
6	1	0.53	31	16.49	40	21.28	57	30.32	59	31.38	188	100
7	1	0.53	27	14.36	46	24.47	59	31.38	55	29.26	188	100
8	2	1.06	33	17.55	50	26.6	48	25.53	55	29.26	188	100
9	0	0	34	18.09	41	21.81	52	27.66	61	32.45	188	100
10	0	0	31	16.49	42	22.34	55	29.26	60	31.91	188	100
11	2	1.06	31	16.49	50	26.6	47	25	58	30.85	188	100
12	2	1.06	32	17.02	39	20.74	57	30.32	58	30.85	188	100
13	0	0	32	17.02	41	21.81	55	29.26	60	31.91	188	100
14	0	0	32	17.02	37	19.68	57	30.32	62	32.98	188	100
15	0	0	32	17.02	44	23.4	50	26.6	62	32.98	188	100
16	1	0.53	33	17.55	36	19.15	57	30.32	61	32.45	188	100
17	0	0	28	14.89	45	23.94	53	28.19	62	32.98	188	100
18	1	0.53	31	16.49	42	22.34	58	30.85	56	29.79	188	100
19	0	0	35	18.62	35	18.62	56	29.79	62	32.98	188	100

Pengaruh variabel rekonsiliasi data secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan berdasarkan hasil uji t dengan menunjukkan nilai p value lebih kecil dari 0.05.

Bastian (2006) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi, yaitu: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat dihindari dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Keseragaman dari bentuk dan format laporan keuangan yang dijadikan acuan sangat berpengaruh dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Irwan (2011), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Sumatera Barat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardi dan Suharjo (2013), yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tual.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa kompetensi SDM (X₁), sistem pengendalian internal pemerintah (X₂), pemanfaatan TI (X₃), rekonsiliasi data (X₄) dan penerapan SAP (X₅) mampu menjelaskan kualitas LK sebesar 86%. kompetensi SDM (X₁) berpengaruh positif terhadap kualitas LK, dengan nilai koefisien jalur (original sample) 0,271, dan signifikan, dengan nilai P-Values = 0,005 < 0,05. Sistem pengendalian internal pemerintah (X₂) berpengaruh positif terhadap kualitas LK, dengan nilai koefisien jalur (original sample) 0,207, dan signifikan, dengan nilai P-Values = 0,003 < 0,05. Pemanfaatan TI (X₃) berpengaruh positif terhadap kualitas LK, dengan nilai koefisien jalur (original sample) 0,171, dan signifikan, dengan nilai P-Values = 0,005 < 0,05. Rekonsiliasi data (X₄) berpengaruh positif terhadap kualitas LK, dengan nilai koefisien jalur (original sample) 0,211, dan signifikan, dengan nilai P-Values = 0,000 < 0,05. Penerapan SAP (X₅) berpengaruh positif terhadap kualitas LK, dengan nilai koefisien jalur (original sample) 0,243, dan signifikan, dengan nilai P-Values = 0,003 < 0,05.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperoleh saran bahwa untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah data sehingga akan diperoleh hasil peneliian yang lebih akurat. Penelitian selanjutnya diharapkan agar kembali menguji variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Para penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Operator SAIBA, Operator BMN, Penata Keuangan pada masing-masing satuan kerja memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda atau tidak hanya berasal dari latar belakang ilmu akuntansi dimana yang berlatar belakang ilmu akuntansi hanya 17% saja selebihnya yang berlatar belakang non akuntansi sebesar 83%. Dengan demikian apabila pegawai yang bukan berasal dari disiplin ilmu akuntansi ditempatkan sebagai PA, PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran pada OPD hendaknya dapat diberikan pembekalan yang cukup mengenai dasar-dasar akuntansi. Penyajian laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses oleh semua pemakai laporan keuangan, memungkinkan dapat berjalannya fungsi

kontrol terhadap pertanggungjawaban daerah berupa laporan keuangan maupun kontrol terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh wakil pengawas, masyarakat dan investor. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel bebas seperti standar akuntansi berbasis akrual, komitmen organisasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Akuntabilitas, Profesionalisme mampu mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan teknik pengamatan tidak hanya menggunakan kuesioner namun menambahkan teknik seperti wawancara dan observasi

References

- Agustina, L. (2015). *Pengaruh Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pengawasan Keuangan Daerah sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Aryani, F. (2013). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II*.
- Bangun, N. (2019). *The Effect of Earning Management , Profitability , and Firm Size on Audited Financial Statement Timeliness*. 4(7).
- Herdianto, D. (2015). Pengaruh Faktor Teknis dan Organisasional Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 2(1).
- Hutagalung, D. H. N. I., Iskandar Muda, S. E., & Ak, C. A. (2018). FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS IN MEDAN CITY GOVERNMENT. *Journal of Public Budgeting. Accounting and Finance*, 1(3), 1–13.
- Kartika, A. (2013). Perbandingan sensitivitas etis antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita serta mahasiswa akuntansi dan manajemen (studi empirik pada perguruan tinggi Di Semarang). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2(1).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Pinem, H. F. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Medan II)*.
- Republik Indonesia. 2010. " Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan".
- Sari, N., Hasan, A., & Diyanto, V. (2016). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan*

Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bu. Riau University.

Syamsuar (2013) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPK Aceh Besar. Tesis. Banda Aceh. Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Yudianta, E., & Erawati, N. M. A. (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(1).
